

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

- A. Junaedi Karso. *Pengantar Tata Hukum Pemerintahan & Dasar-Dasar Tata Negara Di Indonesia*. Eurika Media Aksara, 2022.
- Amad Sudiro, Mella Ismelina Farma Rahayu, Markoni, dan Willy Arafah. "Metodologi Penelitian Hukum," 308. Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah: CV. Diva Pustaka, 2025.
- Angkasa, Nitaria. "Metode Penelitian Hukum: Sebagai Suatu Pengantar," 2:100. Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2019.
- Anggriaini, Jum. "Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah." In *Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KTD)*, 53. Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2011.
- Deassy, Hehanussa J.A, Sopacua Gladies Margie, Surya Achmad, Titahelu Sumarezs Alfaramona Juanrico, Monteiro Mario Josef, Siregar Adelina Rospita, Bagenda Christina, et al. "Metode Penelitian Hukum." *Widina Bhakti persada Bandung* 3, no. 2 (2023): 65.
- DPR. "Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah." diedit oleh Siti Aminah Tommy Andana dan Pradita Devis Dukarno Otto Trengginas Setiawan, 286. Badan Pengkajian MPR RI, 2018.
- Fitriani, Hellen Last. "Hukum Tata Negara Tentang Pemerintah Dan Otonomi Daerah," 1–23. Pekanbaru: The First On-Publisher in Indonesia, 2016.
- Gunardi. "Buku Ajar Metode Penelitian Hukum," 4:182. Damera press, 2022.
- Hsb, Putra Halomoan, dan Nasruddin Khalil Harahap. "Kesadaran Hukum Masyarakat." diedit oleh Mustafid, 54. Kupang, NTT: Tangguh Denara Jaya Publisher, 2025.
- Husin, Budi Rizki. "Studi Lembaga Penegak Hukum," 11:1–14. Bandar Lampung: Heros Fc, 2020.
- Ilham, Muhammad, dan Abdul Rahman. "Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum." In *AMU Press*, 1–179. Bandung: PT Pustaka Interest Media Amani, 2023.
- Indra Muchlis Adnan. "Perkembangan Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia," 9–19. Truss Media Gragika, 2016.

- Karsono, Bambang, dan Amalia Syauket. "Buku Ajar Otonomi Daerah Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi," 154. Ubhara Jaya Press, 2021.
- Marit, Elisabeth Lenny. "Pengantar Otonomi Daerah dan Desa," 154. Yayasan kita menulis, 2021.
- Mau, Hedwig Adianto, dan Tinton Ditisrama. "Hukum Tata Negara Indonesia Teori dan Penerapan," 383. Penerbit Amerta Media, 2024.
- Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum," 65. Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Mulkan, Hasanah, dan Serlika Aprita. "Hukum Otonomi Daerah," 250. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023.
- Mustomi, Otom, Rendi Tri Afrianda, dan Iwan Kusnawirawan. "Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia," 1–210. PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Perwitasari, Hananto Widodo Dita. "Hukum Tata Ruang," 83. Surabaya: Unesa University Press, 2020.
- Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 130.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. "Metode Penelitian Hukum," 11:165. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Rahyunir Rauf. "Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan)," 6:167–86. Zanaf Publishing, 2018.
- Riswanto, Ari, Joko Joko, Yoseb Boari, Mohamad Zaki Taufik, Irianto Irianto, Achmad Farid, Adi Yusuf, Hermyn B Hina, Yusi Kurniati, dan Perdy Karuru. *Metodologi Penelitian Ilmiah: Panduan Praktis Untuk Penelitian Berkualitas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Solikin, Nur. "Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum," 2:306–12. Pasuruan, Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2024.
- Susiani, Dina. "Hukum Pemerintahan Daerah," 130. Tahta Media Group, 2025.
- Syafrida Hafni Sahr. "Metodologi Penelitian," 83. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- V. Sarbudin Panjaitan, *Diskresi Kepala Daerah Perspektif Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana* (Deepublish Digital, 2026), 1-6.

Waluyo, Bambang. "Penegakan Hukum di Indonesia," 292. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.

B. JURNAL

Abdi Syahputra Ritonga, Farhan Azhari Harahap, and M. Nabilul Lufthansa. "Produk Hukum Pemerintah Daerah." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Administrasi Negara* 3, no. 1 (2024): 123–33.

Arifin, Firdaus. "Distribusi Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Bingkai Otonomi Daerah Di Indonesia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 34–46.

Azhar, Mesy Azmiza. "Dinamika Urusan Konkuren Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Desentralisasi." *Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 648–60.

Begouvic, M Eza Helyatha, and Bayu Cuan. "Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia." *Sol Justicia* 4, no. 2 (2021): 105–22.

Daeng, Yusuf, Hafidz Syukri Hamdani, Dedi Adryan, Hendra Gunawan, Yoga Marananda, and William Alfred. "Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 6030–38.

Dessy Kurnia, Suparji, Anis Rifai. "Tinjauan Hukum Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Pasca Undang-Undang CiptaKerja." *Jurnal Bedah Hukum* 9, no. 1 (2025): 19–40.

Eviandi Ibrahim. "Mengenal Sejarah Otonomi Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah." *Jurnal Hukum* 3, no. 5 (2021): 90–97.

Fadlail, Ach. "Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Pengak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan." *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 330–45.

Fikri Hadi, Farina Gandryani, Fatma Afifah. "Konsep Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 3, no. 2 (2025): 83–98.

Gladisya, Azzura, Ade Yuni Sihombing, and Puja Silvia. "Perkembangan Otonomi Daerah Dan Problematika Penerapannya Di Susun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah: Hukum Pemerintahan Daerah Dan Otda." *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1, no. 3 (2022): 441–51.

Huda, Muhammad Miftahul, Suwandi Suwandi, and Aunur Rofiq. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *Jurnal Hak Azazi Manusia* 11,

no. 1 (2022): 115–34.

Isroji, Isroji, Khoirul Anam, Andrie Irawan, Moh Shofiyul Huda Mf, Ahmad Syafii Rahman, and Fadzlurrahman Fadzlurrahman. “Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3, no. 1 (2024): 45–56.

Khoirum, Izni, Habibah Sari, Vera Muslina, and Tita Sandika Siregar. “Asas-Asas Perundang-Undangan Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah & Proses Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 7891–7905.

Marpaung, Oloan C. H. “Reposisi Kedudukan Dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia [Reposition of Position and Authority of Ppns in the Indonesian Criminal Justice System].” *Lex Prospicit* 1, no. 1 (2023): 39.

Masayu, Nyayu Tiara. “Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Penataan Ruang Nasional Dan Penyelenggaraan Penataan Ruang.” *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 238–49.

Mohd. Yusuf DM, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, and Selvin Delpian Giawa. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2866–71.

Mokat, Inda Tarry. “Tinjauan Yuridis Tentang Satuan Polisi Pamong.” *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, no. 4 (2025).

Muhtadin. “Analisis Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Pemerintahan Dalam Perspektif Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.” *Juni* 2, no. 2 (2023): 233–51. <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/ahkam>.

Mulyadi. “Kewenangan Legislatif Dan Kemitraan Yang Setara: Analisis Yuridis Tentang Peran Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembuatan Regulasi Regional.” *Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 59–73.

Nasir, Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, and Raesitha Zildjianda. “Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 241–54.

Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (2022): 49–58.

Paksindra, Reza. “Implementasi Pengawasan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan Perda Kota Mataram No. 10/2015.” *Hukum* 2, no. 2 (2023).

Purnomo, Aris. “Melacak Desentralisasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia: Studi Uu Otonomi Daerah.” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 61–70.

Rosadi, Otong, and Ilham Putra. “Sinergitas Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Kepolisian Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum.” *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (2025): 320–29.

Roziqin, Syahrizal, and Regina Theresia Koyansow. “Sistem Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” *Journal de Facto* 10, no. 2 (2024): 175–92.

Septiani, Veni, Santy Fitnawati, and Rizki Nurdiansyah. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Atas Pedagang Kaki Lima Di Pasar Ciruas Kabupaten Serang,” 2025, 7567–75.

Suhendi, Dedy. “Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menjaga Wibawa Pemerintah Dengan Menegakan Peraturan Daerah.” *Jurnal Tatapamong*, 2021, 157–75.

Tumbelaka, Anastasia Christina Gracia. “Perda Oleh Satpol PP Dalam Menata Pedagang Kaki Lima Untuk Mewujudkan Keteraturan Wilayah Di Jakarta Barat.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 3902–14.

Wardhana, Allan Fatchan Gani, Retno Widiastuti, and Yuniar Riza Hakiki. “Kompleksitas Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 2 (2025): 431–46.

Yudhayana, Surya Wira, and Arya Salman Aziz. “Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat.” *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 79–96.

D. INSTRUMEN HUKUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2038

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2044.

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.

E. WEBSITE

Pemerintah Kota Tanjungpinang. “Selayang Pandang Kota Tanjungpinang.” Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Tanjungpinang, n.d. <https://humprofoto.tanjungpinangkota.go.id/>.

Simamora, Alfandi. “Pedagang Boleh Jualan di Taman Batu 10 Tanjungpinang, Walikota Beri Syarat Ini.” Tribun Batam, 2021. <https://batam.tribunnews.com/2021/10/03/pedagang-boleh-jualan-di-taman-batu-10-tanjungpinang-walikota-beri-syarat-ini>.